**SALINAN**

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan yang berasal dari:
   a. jasa registrasi, notifikasi, dan evaluasi;
   b. jasa inspeksi;
   c. jasa sertifikasi dan penerbitan izin penerapan; dan
   d. denda administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa inspeksi fasilitas pembuatan produk impor dan inspeksi sentra uji bioekivalensi di luar negeri tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

(2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa registrasi dan jasa notifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan produksi di dalam negeri ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini berupa:

a. penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat bahan alam bersama kosmetik, dan pangan olahan untuk usaha mikro obat bahan alam;

b. sertifikasi pemenuhan komitmen sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran untuk pengelola pasar dan usaha mikro dan kecil;

c. sertifikasi pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran untuk usaha mikro dan kecil dalam negeri kecuali importir; dan

d. jasa sertifikasi ekspor berupa surat keterangan ekspor (*certificate of free sale, health certificate,* dan/atau *export notification for food packaging*) untuk pangan olahan dan kemasan pangan untuk usaha mikro dan kecil,

ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1) Dengan pertimbangan tertentu:

a. tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

b. tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak selain yang telah diatur dalam Pasal 3,

dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen).

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya transportasi" adalah biaya transportasi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan selama melakukan kegiatan inspeksi.

Yang dimaksud dengan "biaya akomodasi" adalah biaya akomodasi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan selama melakukan kegiatan inspeksi.

Yang dimaksud dengan "biaya konsumsi" adalah biaya konsumsi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan selama melakukan kegiatan inspeksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| I. | JASA REGISTRASI, NOTIFIKASI, DAN EVALUASI | | |
| | A. Jasa Registrasi | | |
| | 1. Obat | | |
| | a. Pra registrasi | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | b. Registrasi obat dengan zat aktif baru, produk biologi, kombinasi baru | Per Item | Rp 30.000.000,00 |
| | c. Registrasi obat baru atau produk biologi yang sudah terdaftar dengan indikasi dan/atau posologi baru, bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, dan kekuatan baru | Per Item | Rp 20.000.000,00 |
| | d. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf b atau huruf c dan didaftarkan bersamaan dengan huruf b atau huruf c | Per Item | Rp 7.500.000,00 |
| | e. Registrasi obat generik bermerek dengan nama dagang/registrasi obat khusus ekspor | Per Item | Rp 7.500.000,00 |

f. Registrasi . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | f. Registrasi obat generik bermerek dengan nama dagang yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi) | Per Item | Rp 12.500.000,00 |
| | g. Registrasi obat generik bermerek dengan nama dagang dengan kekuatan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf f dan didaftarkan bersamaan dengan huruf f | Per Item | Rp 7.500.000,00 |
| | h. Registrasi obat generik | Per Item | Rp 2.000.000,00 |
| | i. Registrasi obat generik yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi) | Per Item | Rp 7.000.000,00 |
| | j. Registrasi obat generik dengan kekuatan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf i dan didaftarkan bersamaan dengan huruf i | Per Item | Rp 2.000.000,00 |
| | k. Registrasi obat dengan kombinasi baru atau bentuk sediaan baru atau kekuatan baru yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik | Per Item | Rp 7.500.000,00 |
| | l. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu dan/atau informasi produk dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik | Per Item | Rp 12.500.000,00 |
| | m. Registrasi variasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf l dan didaftarkan bersamaan dengan huruf l | Per Item | Rp 2.000.000,00 |

n. Registrasi . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | n. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi) | Per Item | Rp 12.500.000,00 |
| | o. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik | Per Item | Rp 7.500.000,00 |
| | p. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi) | Per Item | Rp 7.000.000,00 |
| | q. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi) | Per Item | Rp 2.000.000,00 |
| | r. Registrasi variasi obat generik/obat generik bermerek yang memerlukan evaluasi aspek mutu yang mempengaruhi aspek khasiat-keamanan dan memerlukan evaluasi data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi) | Per Item | Rp 7.000.000,00 |

s. Registrasi . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | s. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu dan/atau informasi produk dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat-keamanan yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik | Per Item | Rp 2.000.000,00 |
| | t. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang tidak mempengaruhi aspek keamanan, variasi ukuran kemasan, perubahan desain keamanan | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | u. Registrasi ulang obat bermerek | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | v. Registrasi ulang obat generik | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | 2. Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi | | |
| | a. Pra registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, atau obat kuasi | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | b. Registrasi baru: | | |
| | 1) Obat bahan alam produksi dalam negeri dalam bentuk: | | |
| | a) Sediaan sederhana untuk penggunaan luar | Per Item | Rp 200.000,00 |
| | b) Sediaan sederhana untuk penggunaan oral | Per Item | Rp 500.000,00 |
| | c) Sediaan modern | Per Item | Rp 800.000,00 |
| | 2) Obat bahan alam produksi dalam negeri dengan bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru | Per Item | Rp 7.500.000,00 |
| | 3) Obat herbal terstandar | Per Item | Rp 3.700.000,00 |
| | 4) Fitofarmaka | Per Item | Rp 8.000.000,00 |
| | 5) Obat bahan alam impor | Per Item | Rp 15.000.000,00 |

6) Obat . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 6) Obat bahan alam impor dengan bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru | Per Item | Rp 20.000.000,00 |
| | 7) Suplemen kesehatan dengan bentuk sediaan: | | |
| | a) Bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin dan/atau mineral | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | b) Bahan berupa isolate atau asam amino atau herbal atau bahan lain yang disetujui sebagai suplemen kesehatan dalam bentuk tunggal dan/atau kombinasi dengan bahan lain seperti vitamin dan/atau mineral | Per Item | Rp 10.000.000,00 |
| | c) Bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru | Per Item | Rp 15.000.000,00 |
| | 8) Obat kuasi baru produk dalam negeri | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | 9) Obat kuasi impor | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | c. Registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi khusus ekspor | Per Item | Rp 0,00 |
| | d. Registrasi ulang: | | |
| | 1) Obat bahan alam produksi dalam negeri dalam bentuk: | | |
| | a) Sediaan sederhana untuk penggunaan luar | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | b) Sediaan sederhana untuk penggunaan oral | Per Item | Rp 250.000,00 |
| | c) Sediaan modern | Per Item | Rp 400.000,00 |

2) Obat . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 2) Obat herbal terstandar | Per Item | Rp 2.500.000,00 |
| | 3) Fitofarmaka | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | 4) Obat bahan alam impor | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | 5) Suplemen kesehatan | | |
| | a) Dengan bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin dan/atau mineral | Per item | Rp 2.500.000,00 |
| | b) Suplemen kesehatan lainnya | Per item | Rp 5.000.000,00 |
| | 6) Obat kuasi dalam negeri | Per Item | Rp 500.000.00 |
| | 7) Obat kuasi impor | Per Item | Rp 2.500.000.00 |
| | e. Registrasi variasi obat bahan alam: | | |
| | 1) Variasi minor dengan notifikasi | Per Item | Rp 0,00 |
| | 2) Variasi minor dengan persetujuan | Per Item | Rp 200.000,00 |
| | 3) Variasi mayor: | | |
| | a) Yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan | Per Item | Rp 500.000,00 |
| | b) Yang mempengaruhi khasiat dan keamanan | Per Item | Rp 800.000,00 |
| | c) Untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru | Per Item | Rp 7.500.000,00 |
| | f. Registrasi variasi suplemen kesehatan: | | |
| | 1) Variasi minor dengan notifikasi | Per Item | Rp 0,00 |
| | 2) Variasi minor dengan persetujuan | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | 3) Variasi mayor: | | |
| | a) yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan | Per Item | Rp 2.000.000,00 |

b) yang . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | b) yang mempengaruhi khasiat dan keamanan | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | c) untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru | Per Item | Rp 15.000.000,00 |
| | g. Registrasi variasi obat kuasi: | | |
| | 1) Variasi minor dengan notifikasi | Per Item | Rp 0,00 |
| | 2) Variasi minor dengan persetujuan | Per Item | Rp 500.000,00 |
| | 3) Variasi mayor | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | 3. Pangan Olahan | | |
| | a. Registrasi baru pangan olahan | | |
| | 1) Pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori pangan 13.0 | Per Item | Rp 3.000.000,00 |
| | 2) Produk pangan hasil rekayasa genetik/iradiasi/pangan organik | Per Item | Rp 2.000.000,00 |
| | 3) Kategori pangan 01.0 | Per Item | Rp 750.000,00 |
| | 4) Kategori pangan 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, dan 16.0 | Per Item | Rp 300.000,00 |
| | 5) Kategori pangan 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, dan 10.0 | Per Item | Rp 500.000,00 |
| | 6) Kategori pangan 11.0, 12.0, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong | Per Item | Rp 200.000,00 |
| | b. Registrasi variasi/perubahan data pangan olahan: | | |
| | 1) Perubahan data akun perusahaan | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | 2) Perubahan desain label | Per Item | Rp 100.000,00 |

3) Perubahan . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 3) Perubahan data komposisi, informasi nilai gizi, dan/atau klaim pangan olahan terdaftar untuk: | | |
| | a) Pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori pangan 13.0 | Per Item | Rp 1.500.000,00 |
| | b) Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, dan pangan organik | Per Item | Rp 1.000.000,00 |
| | c) Kategori pangan 01.0 | Per Item | Rp 400.000,00 |
| | d) Kategori pangan 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, dan 16.0 | Per Item | Rp 150.000,00 |
| | e) Kategori pangan 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, dan 10.0 | Per Item | Rp 250.000,00 |
| | f) Kategori pangan 11.0, 12.0, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | 4) Perubahan data pangan olahan terdaftar selain perubahan data pada angka 2 dan angka 3 | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | c. Registrasi ulang pangan olahan | | |
| | 1) Pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori pangan 13.0 | Per Item | Rp 2.500.000,00 |
| | 2) Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, dan pangan organik | Per Item | Rp 1.500.000,00 |
| | 3) Kategori pangan 01.0 | Per Item | Rp 600.000,00 |
| | 4) Kategori pangan 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, dan 16.0 | Per Item | Rp 200.000,00 |
| | 5) Kategori pangan 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, dan 10.0 | Per Item | Rp 400.000,00 |

6) Kategori . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 6) Kategori pangan 11.0, 12.0, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong | Per Item | Rp 150.000,00 |
| | B. Jasa Notifikasi | | |
| | 1. Notifikasi kosmetik yang diproduksi di luar negara anggota ASEAN | Per Item | Rp 1.500.000,00 |
| | 2. Notifikasi kosmetik yang diproduksi di negara anggota ASEAN | Per Item | Rp 500.000,00 |
| | 3. Pemberitahuan produk kombinasi atau kit kosmetik | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | 4. Perubahan ukuran dan/atau jenis Kemasan kosmetik | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | 5. Perubahan nama industri/importir/ badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetik dan/atau perubahan alamat importir/badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetik tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan produk | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | C. Jasa Evaluasi | | |
| | 1. Evaluasi obat | | |
| | a. Evaluasi permohonan obat pengembangan baru | Per Item | Rp 10.000.000,00 |
| | b. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji klinik | Per Item | Rp 5.000.000,00 |
| | c. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji bioekivalensi | Per Item | Rp 2.500.000,00 |
| | d. Evaluasi permohonan pemasukan obat melalui mekanisme jalur khusus | Per Item | Rp 100.000,00 |
| | e. Persetujuan Iklan Obat | | |
| | 1) Permohonan persetujuan iklan kategori minor dan mayor | Per Versi Per Iklan Per Produk | Rp 200.000,00 |

2) Permohonan . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 2) Permohonan persetujuan iklan layanan notifikasi | Per Versi Per Iklan Per Produk | Rp 100.000,00 |
| | 2. Evaluasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik | | |
| | a. Evaluasi permohonan persetujuan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, atau obat kuasi | | |
| | 1) Permohonan persetujuan rancangan iklan pada media audio dan audiovisual | Per Konsep | Rp 200.000,00 |
| | 2) Permohonan persetujuan rancangan iklan pada media visual | Per Konsep | Rp 100.000,00 |
| | b. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji klinik dan penelitian klinik | Per Protokol | Rp 2.000.000,00 |
| | c. Evaluasi hasil uji klinik dan penelitian klinik | Per Laporan | Rp 2.000.000,00 |
| | d. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji pra klinik: | | |
| | 1) Uji toksisitas akut | Per Protokol | Rp 300.000,00 |
| | 2) Uji toksisitas subkronik/ kronik/khusus | Per Protokol | Rp 500.000,00 |
| | 3) Uji farmakodinamik | Per Protokol | Rp 500.000,00 |
| | e. Evaluasi hasil uji pra klinik: | | |
| | 1) Uji toksisitas akut | Per Laporan | Rp 300.000,00 |
| | 2) Uji toksisitas subkronik/ kronik/khusus | Per Laporan | Rp 500.000,00 |
| | 3) Uji farmakodinamik | Per Laporan | Rp 500.000,00 |
| | 3. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji klinik pangan olahan | Per Protokol | Rp 2.000.000,00 |

II. JASA . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| II. | JASA INSPEKSI | | |
| | A. Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor | | |
| | 1. *Desktop inspection* | | |
| | a. Obat | Per Produk | Rp 7.500.000,00 |
| | 2. Inspeksi Fasilitas Pembuatan Produk Impor | Per Fasilitas Pembuatan/ Sarana Produksi | Rp 50.000.000,00 |
| | B. Inspeksi Sentra Uji Bioekivalensi di Luar Negeri | Per Hari | USD 500 |
| III. | JASA SERTIFIKASI DAN PENERBITAN IZIN PENERAPAN | | |
| | A. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB): | | |
| | 1. Baru (inspeksi dalam rangka sertifikasi) | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 15.000.000,00 |
| | 2. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (antara lain perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama) | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | 3. Perubahan/perluasan fasilitas/gedung: | | |
| | a. Perubahan/perluasan fasilitas/ gedung pada fasilitas non-steril | Per Persetujuan | Rp 10.000.000,00 |
| | b. Perubahan/perluasan fasilitas/ gedung pada fasilitas steril | Per Persetujuan | Rp 12.000.000,00 |
| | 4. Penambahan fasilitas | | |
| | a. Fasilitas kemas sekunder pada gedung baru di lokasi sesuai izin industri farmasi | | |
| | 1) Inspeksi dalam rangka penambahan fasilitas | Per Persetujuan | Rp 7.000.000,00 |
| | b. Gudang di luar lokasi sesuai izin industri farmasi | | |

1) Inspeksi . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 1) Inspeksi dalam rangka penambahan gudang | Per Persetujuan | Rp 2.000.000,00 |
| | 2) Perpanjangan gudang di luar lokasi sesuai izin industri farmasi | Per Persetujuan | Rp 2.000.000,00 |
| | 5. Perpanjangan sertifikat CPOB | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 7.000.000,00 |
| | B. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama | | |
| | 1. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat (obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi) | Per Persetujuan, Per Komoditi, Per Bentuk Sediaan | Rp 5.000.000,00 |
| | 2. Perubahan persetujuan penggunaan fasilitas bersama karena perubahan administrasi (antara lain perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama) | Per Persetujuan, Per Komoditi, Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | C. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB): | | |
| | 1. Sertifikat CDOB baru | Per Permohonan | Rp 7.000.000,00 |
| | 2. Perubahan sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi | Per Permohonan | Rp 5.000.000,00 |
| | 3. Perubahan sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |
| | 4. Perpanjangan sertifikat CDOB | Per Permohonan | Rp 7.000.000,00 |
| | D. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB): | | |
| | 1. Industri Obat Bahan Alam (IOBA) | | |
| | a. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 5.000.000,00 |

b. Perubahan . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | b. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama) | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | c. Perpanjangan sertifikat | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 3.000.000,00 |
| | d. Perubahan fasilitas | | |
| | 1) Memerlukan inspeksi | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 2.000.000,00 |
| | 2) Tidak memerlukan inspeksi | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | 2. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) | | |
| | a. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 5.000.000,00 |
| | b. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama) | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | c. Perpanjangan sertifikat | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 3.000.000,00 |
| | d. Perubahan fasilitas | | |
| | 1) Memerlukan inspeksi | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 2.000.000,00 |
| | 2) Tidak memerlukan inspeksi | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |

3. Usaha . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 3. Usaha Kecil Obat Bahan Alam | | |
| | a. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 1.500.000,00 |
| | b. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama) | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 250.000,00 |
| | c. Perpanjangan sertifikat | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 1.000.000,00 |
| | d. Perubahan fasilitas | | |
| | 1) Memerlukan inspeksi | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | 2) Tidak memerlukan inspeksi | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 250.000,00 |
| | E. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara Bertahap | | |
| | 1. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 0,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 0,00 |
| | 3. Perubahan Administrasi | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 0,00 |
| | F. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan | | |

1. Industri . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 1. Industri Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (Baru/Perpanjangan) | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 2.000.000,00 |
| | 2. Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik/Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Bertahap (Baru/Perpanjangan) | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 1.000.000,00 |
| | G. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan | | |
| | 1. Baru | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 5.000.000,00 |
| | 2. Perpanjangan | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 3.000.000,00 |
| | 3. Perubahan Administratif | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | 4. Perubahan Fasilitas | Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan | Rp 2.000.000,00 |
| | H. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan | | |
| | 1. Baru/Perpanjangan | Per Rekomendasi | Rp 5.000.000,00 |
| | 2. Perubahan Administratif | Per Rekomendasi | Rp 500.000,00 |
| | 3. Perubahan Fasilitas | Per Rekomendasi | Rp 2.000.000,00 |

I. Rekomendasi . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | I. Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar atau rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran obat kuasi dan suplemen kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar | | |
| | 1. Baru/Perpanjangan | Per Rekomendasi | Rp 5.000.000,00 |
| | 2. Perubahan Administratif | Per Rekomendasi | Rp 500.000,00 |
| | 3. Perubahan Fasilitas | Per Rekomendasi | Rp 2.000.000,00 |
| | J. Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) | | |
| | 1. Industri Besar | | |
| | a. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 10.000.000,00 |
| | b. Pembaharuan | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 5.000.000,00 |
| | c. Perubahan administrasi | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 500.000,00 |
| | d. Perubahan teknis | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 2.500.000,00 |
| | 2. Industri Menengah | | |
| | a. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 5.000.000,00 |
| | b. Pembaharuan | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp 3.000.000,00 |

c. Perubahan . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|---|---|---|---|
| | c. Perubahan administrasi | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp | 250.000,00 |
| | d. Perubahan teknis | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp | 1.500.000,00 |
| | 3. Usaha Mikro dan Kecil | | | |
| | a. Baru | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp | 0,00 |
| | b. Pembaharuan | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp | 0,00 |
| | c. Perubahan administrasi | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp | 0,00 |
| | d. Perubahan teknis | Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan | Rp | 0,00 |
| | K. Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A | | | |
| | 1. Baru | Per Sertifikat | Rp | 1.000.000,00 |
| | 2. Pembaharuan | Per Sertifikat | Rp | 500.000,00 |
| | 3. Perubahan administrasi | Per Sertifikat | Rp | 250.000,00 |
| | 4. Perubahan teknis | Per Sertifikat | Rp | 500.000,00 |
| | L. Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B | | | |
| | 1. Baru | Per Sertifikat | Rp | 0,00 |
| | 2. Pembaharuan | Per Sertifikat | Rp | 0,00 |
| | 3. Perubahan administrasi | Per Sertifikat | Rp | 0,00 |
| | 4. Perubahan teknis | Per Sertifikat | Rp | 0,00 |
| | M. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik | | | |

1. Baru . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Baru | | | |
| | a. Importir | Per Persetujuan | Rp | 1.000.000,00 |
| | b. Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi | Per Persetujuan | Rp | 250.000,00 |
| | 2. Perubahan | | | |
| | a. Importir | Per Persetujuan | Rp | 500.000,00 |
| | b. Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi | Per Persetujuan | Rp | 100.000,00 |
| | N. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) atau Obat Kuasi | | | |
| | 1. Baru | | | |
| | a. Industri Besar | Per Persetujuan | Rp | 2.000.000,00 |
| | b. Industri Menengah | Per Persetujuan | Rp | 1.000.000,00 |
| | c. Industri Mikro dan Kecil | Per Persetujuan | Rp | 0,00 |
| | 2. Pembaharuan | | | |
| | a. Industri Besar | Per Persetujuan | Rp | 500.000,00 |
| | b. Industri Menengah | Per Persetujuan | Rp | 250.000,00 |
| | c. Industri Mikro dan Kecil | Per Persetujuan | Rp | 0,00 |
| | 3. Perubahan Administrasi | | | |
| | a. Industri Besar | Per Persetujuan | Rp | 250.000,00 |
| | b. Industri Menengah | Per Persetujuan | Rp | 100.000,00 |

c. Industri . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | c. Industri Mikro dan Kecil | Per Persetujuan | Rp 0,00 |
| | O. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | | |
| | 1. Usaha Besar | | |
| | a. Baru | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 3.000.000,00 |
| | b. Perubahan teknis | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 1.000.000,00 |
| | c. Perpanjangan | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 2.000.000,00 |
| | 2. Usaha Menengah | | |
| | a. Baru | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 1.000.000,00 |
| | b. Perubahan teknis | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 500.000,00 |
| | c. Perpanjangan | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 750.000,00 |
| | 3. Usaha Mikro dan Kecil | | |

a. Baru . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | a. Baru | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 0,00 |
| | b. Perubahan teknis | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 0,00 |
| | c. Perpanjangan | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 0,00 |
| | P. Penerbitan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan | | |
| | 1. Usaha Besar | | |
| | a. Baru | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 5.000.000,00 |
| | b. Perubahan teknis | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 2.000.000,00 |
| | c. Perpanjangan | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 3.000.000,00 |
| | 2. Usaha Menengah | | |
| | a. Baru | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 3.000.000,00 |

b. Perubahan . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | b. Perubahan teknis | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 1.000.000,00 |
| | c. Perpanjangan | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 1.500.000,00 |
| | Q. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan Risiko Tinggi | | |
| | 1. Baru | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 0,00 |
| | 2. Perubahan Teknis | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 0,00 |
| | 3. Perpanjangan | Per Izin<br>Per Lokasi<br>Per Proses Produksi | Rp 0,00 |
| | R. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran | | |
| | 1. Penerbitan Baru | Per Sertifikat Per Sarana | Rp 250.000,00 |
| | 2. Perubahan | Per Sertifikat Per Sarana | Rp 50.000,00 |
| | 3. Perpanjangan | Per Sertifikat Per Sarana | Rp 100.000,00 |

S. Sertifikasi . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|---|---|---|---|---|
| | S. Sertifikasi Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran | | | |
| | 1. Penerbitan baru | Per Sertifikat Per Sarana | Rp | 500.000,00 |
| | 2. Perubahan | Per Sertifikat Per Sarana | Rp | 100.000,00 |
| | 3. Perpanjangan | Per Sertifikat Per Sarana | Rp | 250.000,00 |
| | T. Sertifikasi Ekspor dan Impor | | | |
| | 1. Surat Keterangan Impor | | | |
| | a. Bahan baku | Per Item Produk | Rp | 50.000,00 |
| | b. Produk jadi | Per Item Produk | Rp | 100.000,00 |
| | c. Bahan tambahan | Per Item Produk | Rp | 50.000,00 |
| | 2. Pemasukan melalui Mekanisme Jalur Khusus/*Special Access Scheme* bahan baku, produk jadi, dan bahan tambahan | Per Item Produk | Rp | 100.000,00 |
| | 3. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Pharmaceutical Product*) untuk obat | Per Item Produk | Rp | 50.000,00 |
| | 4. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Certificate of Health*, Surat Keterangan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang Baik, Surat Keterangan Lain yang Sesuai dengan Persyaratan di Negara Tujuan Ekspor) untuk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan | Per Item Produk | Rp | 0,00 |

5. Surat . . .

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|---|---|---|
| | 5. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Certificate of Health,* Surat Keterangan Sertifikat CPKB) untuk Kosmetik | Per Item Produk | Rp 0,00 |
| | 6. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale, Health Certificate, Export Notification for Food Packaging* dan/atau Sertifikat Iradiasi) untuk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan | Per Item Produk | Rp 50.000,00 |
| | 7. Surat Keterangan Penerapan CPOB | Per Surat Per Bentuk Sediaan | Rp 100.000,00 |
| | U. Permohonan Analisis Hasil Pengawasan (AHP) Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi: | | |
| | 1. AHP Impor | Per Item Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| | 2. AHP Ekspor | Per Item Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| | V. Sertifikasi Pelulusan *Batch/Lot* Vaksin | Per *Batch/Lot* | Rp 150.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 283545 A